LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN 2023

KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Ambulu Kinerja Kecamatan Ambulu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2023.

26 Januari 2024

CAMAT AMBULU

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 198602 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambulu Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2023

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kwalitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Perubahan Renstra Kecamatan Ambulu tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat predikat nilai memuaskan Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran dengan Realisasi Kinerja 96,83% dari target Renstra 80 %

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mendapat predikat nilai memuaskan Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Realisasi Kinerja 83,57 % dari target Renstra 80 %

Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai memuaskan Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran yaitu Indeks

Kepuasan Masyarakat dengan Realisasi Kinerja 100 % dari target Renstra 100 %

Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai memuaskan Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran yaitu Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta dengan Realisasi Kinerja 100 % dari target Renstra 100 %

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Ambulu telah dilaksanakan dengan memuaskanr

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 98 % merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 3.955.085.539,- dan Belanja Modal sebesar 2 % atau sebesar Rp. 87.839.900 ,-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.572.269.984,00,- atau 88,36% % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan karena harga makanan terlalu besar di satuan harga sehingga tidak terealisasi sesuai standar harga satuan

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pemerintahan Kecamatan Ambulu
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang handal, terampil dan memiliki kompetensi yang tinggi

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Mencukupi ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pemerintahan Kecamatan Ambulu Pemenuhan peralatan
2. Menambah dan meningkatan sumber daya manusia yang handal, terampil dan memiliki kompetensi yang tinggi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Ambulu dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan kecamatan Ambulu

Kinerja kecamatan Ambulu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kecamatan Ambulu tahun 2023

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Ambulu dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Ambulu adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Ambulu
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Ambulu dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Ambulu dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN AMBULU

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Ambulu diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

1) Kecamatan Ambulu merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
2) Kecamatan Ambulu dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3) Kecamatan Ambulu mempunyai tugas :
   a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4) Kecamatan Ambulu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
b. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

h. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
j. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
k. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
l. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
m. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

5) Susunan Organisasi Kecamatan Ambulu terdiri dari :
a. Camat;
b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
f. Seksi Pelayanan Umum;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

6) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN AMBULU

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Ambulu terdiri dari 18 ASN dan 10 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Ambulu :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Ambulu
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekretaris Camat	1	
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	
4	Pengelola Kepegawaian		
5	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		
6	Pengadministrasi Umum	1	
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	1	
8	Bendahara		
9	Pengelola Keuangan		

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
10	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	2	
11	Kepala Seksi Pemerintahan	1	
12	Pengelola Administrasi Pemerintahan		
13	Pengadministrasi Pemerintahan	1	
14	Pengadministrasi Pemerintahan	1	
15	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	
16	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban		
17	Pengadministrasi Umum	1	
18	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahtaraan Sosial	1	
19	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	
20	Pengelola Kesejahteraan Sosial		
21	Pengadministrasi Umum	1	
22	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1	
23	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		
24	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		
25	Pengadministrasi Kependudukan	2	

Tabel 1.2

Jumlah ASN Kecamatan Ambulu
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk. I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	
3	Penata Tingkat I	III/d	4
4	Penata	III/c	2
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	1
6	Penata Muda	III/a	5
7	Pengatur Tingkat I	II/d	3
8	Pengatur	II/c	2
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	
10	Pengatur Muda	II/a	
11	Juru Tingkat I	I/d	
12	Juru	I/c	
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	
	Jumlah		**18**

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Ambulu
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2023

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD		ASN
2	SLTP		ASN
3	SMA/STM	**8**	ASN
4	D3		ASN
5	S1	**9**	ASN
6	S2	**1**	ASN
7	SD		Non ASN
8	SLTP		Non ASN
9	SMA/STM		Non ASN
10	D3		Non ASN
11	S1		Non ASN
12	S2		Non ASN
Jumlah		**18**	

E. Profil Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Luas Wilayah Kecamatan Ambulu memiliki luas wilayah sebesar 104,39 kilometer persegi. Luas wilayah ini setara dengan 2,23% dari total luas wilayah Kabupaten Jember.

Perbatasan Wilayah Kecamatan Ambulu berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- Sebelah utara: Kecamatan Jenggawah
- Sebelah timur: Kecamatan Tempurejo
- Sebelah selatan: Samudra Hindia
- Sebelah barat: Kecamatan Wuluhan

Jumlah Penduduk, jumlah penduduk Kecamatan Ambulu sebanyak 120.114 jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari 60.701 laki-laki dan 59.413 perempuan. Berdasarkan Data Pendudukan dalam Angka yang di terbitkan Dinas Pendudukan dan

Capil Kabupaten Jember tahun 2022 , Prosentase mata pencaharian penduduk Kecamatan Ambulu sebagai berikut:

- Aparatur : 1%
- Tenaga Pengajar : 1%
- Wiraswasta : 24%
- Pertanian/Peternakan : 19 %
- Nelayan : 0,7%
- Tenaga Kesehatan : 0,2%
- Pelajar : 13,7%
- Lainnya : 40%

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Ambulu adalah di bidang pertanian dan Wiraswasta. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah Kecamatan Ambulu yang sebagian besar merupakan lahan pertanian. Secara Administratif, Kecamatan Ambulu, membawahi 7 (tujuh) Desa Yaitu :

1. Ambulu;
2. Karanganyar;
3. Tegalsari;
4. Pontang;
5. Sabrang;
6. Andongsar;
7. Sumbererjo .

- Sumber data dari Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember tahun 2023
- Data Pendudukan dalam Angka yang di terbitkan Dinas Pendudukan dan Capil Kabupaten Jember tahun 2022

F. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Ambulu , yaitu:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam juamlah dan kompetensinya;

2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecematan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Ambulu merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Stategis Kecamatan Ambulu mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 (dua) dan tujuan ke 2 (dua) yaitu

1) Misi ke - 2 : *Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"*
2) Tujuan ke- 2 : Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3) Sasaran Strategis Kabupaten :
    1. Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas.
    2. Meningkatnya realisasi pajak dan retribusi daerah
    3. Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menegah dan tahunan Kecamatan Ambulu sebagaimana termuat didalam rencana Kecamatan Ambulu Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN AMBULU TAHUN 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)	95	95	96	97	98	99
			Persentase Peningkatan PBB, PajaK Lainnya	100	100	100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			dan Retribusi						
			Persentase Desa Mandiri pada Kec Ambulu	100	100	100	100	100	100
Sesudah Perubahan Renstra									
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP Ambulu			80	82	85	85
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai			80	80	80	100
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata			4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	pemerin tahan dan pelayanan publik.		Laksana Pemerintah Daerah						
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			80	82	82	85
		Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%
1		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran			100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat						

Sebelum perubahan, Renstra memiliki satu tujuan utama yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kualitas pelayanan publik. Sasaran yang ditetapkan terkait peningkatan kualitas pelayanan aparatur dan publik.

Sesudah perubahan, Renstra memiliki dua tujuan utama. Pertama adalah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kedua adalah meningkatkan penataan organisasi pemerintahan dan tata laksana.

Tujuan pertama memiliki satu sasaran terkait peningkatan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah. Tujuan kedua memiliki tiga sasaran terkait peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, fasilitasi kesejahteraan masyarakat, dan menjaga ketertiban umum.

Jadi, terjadi pergeseran orientasi dari peningkatan pelayanan publik menjadi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta penataan organisasi pemerintahan. Selain itu, ada penambahan sasaran terkait Peningkatan Pelayanan Publik kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.

Sumber data :

1. Tabel VII – 1 (T-C 28) pada Rencana Strategis Kecamatan Ambulu tahun 2021-2026
2. (T-C 25) pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Ambulu tahun 2021-2026

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Ambulu Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebelum perubahan

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	**Indikator Tujuan**	**Uraian**	**Indikator Sasaran**	**Target**	**Nama Program Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Nama Sub Kegiatan**	**Indikator kegiatan (Output)**	**Target**	**Anggaran**
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	96	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip OPD	85				
					Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 5.136.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan	18 Orang/Bulan	Rp 2.197.468.450
								Pelaksanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (SPM)	100 Dokumen	Rp 98.634.500
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Pegawai Yang	100%	Pengadaan pakaian Dinas beserta atributnya	Jumlah Paket Pengadaan pakaian Dinas	1 Paket	Rp 24.200.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
						difasiliasi sesuai rencana					
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 90.594.200
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan jasa Operasional Kantor yang difasilitasi sesuai rencana	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	Rp 246.946.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yg dilaksanakan pemeliharaan sesuai rencana	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kend. Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Rp 40.141.700
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	Rp 23.174.000
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 unit	Rp 9.520.878

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								dan bangunan lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		
		Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	85 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKM terhadap layanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	B Nilai				
					Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaran pemerintahan yg ditindak lanjuti	100%	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Rp 1.031.672.500
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase dokumen adminduk dan surat surat yang diterbitkan	100%	Peningkatan Pelaksanaan efektifitas kepada masyarakat di wilayah kjecamatan	Jumlah warga masyarakat yang bisa terfasilitasi dalam pengurusan surat surat	10000 Surat	Rp 14.691.800

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
		Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Ambulu	90%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditindaklanjuti	100%				
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditindaklanjuti	100%	Penigkatan Partisipasi Masyarakat dlam forum Musawarah Perencanan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musawarah perencanan pembangunan di Desa	16 lembaga	Rp 6.718.800
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyara- kat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penigkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyara kat di Wilayah Kecamatan	20 laporan	Rp 603.991.100
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenraman dan ketertiban yang dapat terfasiitasi kecamatan	100%				
					Koordinasi Penerapan dan	Persentase hasil koordinasi	100%	Koordinasi/Sinergi Dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	24 laporan	Rp 252.935.700

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti		Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI		
					Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Pemerintah Desa yang dapat terfasilitasi oleh Kecamatan	100%				
					Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi kepada Pemerintahaan Desa yang ditindaklanjuti	100%	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 dokumen	Rp 3.988.800
								Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	3 dokumen	Rp 9.453.800

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								pendayagunaan Aset Desa	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		

Sesuai Tabel VII – 1 (T-C 28) pada Rencana Strategis Kecamatan Ambulu tahun 2021-2026

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesudah perubahan

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	**Indikator Tujuan**	**Uraian**	**Indikator Sasaran**	**Target**	**Nama Program Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Nama Sub Kegiatan**	**Indikator kegiatan (Output)**	**Target**	**Anggaran**
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP Ambulu	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase realisasi anggaran	100%				
					Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 2.036.000,00
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	4 Lap	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan	18 Orang/Bulan	Rp 2.089.889.761,00
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	3 Dokumen	Rp 96.414.500,00
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase Kebutuhan Pegawai	1 Dokumen	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas	Jumlah Paket Pengadaan pakaian Dinas	1 Paket	Rp 14.000.000,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Perangkat Daerah	Yang difasiliasi sesuai rencana		beserta atributnya			
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 87.839.900,00
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan jasa Operasional Kantor yang difasilitasi sesuai rencana	100%	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dibayarkan Pajaknya	12 bulan	Rp 226.198.300,00
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yg dilaksanakan pemeliharaan sesuai rencana	100%	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kend. Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 unit	Rp 44.641.700,00
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	Rp 24.674.000,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	**Indikator Tujuan**	**Uraian**	**Indikator Sasaran**	**Target**	**Nama Program Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Nama Sub Kegiatan**	**Indikator kegiatan (Output)**	**Target**	**Anggaran**
								Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	Rp 9.520.878,00
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%				
					Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaran pemerintah an yg ditindak lanjuti	100%	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Rp 1.031.672.500,00
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat	Persentase dokumen adminduk dan surat surat yang diterbitkan	100%	Sub Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan efektifitas kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah warga masyarakat yang bisa terfasilitasi dalam pengurusan surat surat	10000 Surat	Rp 14.691.800,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Daerah yang ada di Kecamatan						
		Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditindaklanjuti	100%				
					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditindaklanjuti	100%	Sub Kegiatan Penigkatan Partisipasi Masyarakat dlam forum Musawarah Perencanan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musawarah perencanan pembangunan di Desa	16 lembaga	Rp 6.718.800,00
								Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyara- kat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penigkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyara kat di Wilayah Kecamatan	20 laporan	Rp 136.867.000,00
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban	100%	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenraman dan ketertiban yang	100%				

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
		masyarakat di Kecamatan	Umum serta Ketentaraman Masyarakat			dapat terfasiitasi kecamatan					
					Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	24 laporan	Rp 244.317.700,00
					Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Pemerintah Desa yang dapat terfasilitasi oleh Kecamatan	100%				
					Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi kepada Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	100%	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 dokumen	Rp 3.988.800,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 dokumen	Rp 9.453.800,00

Sesuai (T-C 25) pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Ambulu tahun 2021-2026

Cascading Kinerja Kecamatan

CASCADING TAHUN 2023
KECAMATAN AMBULU

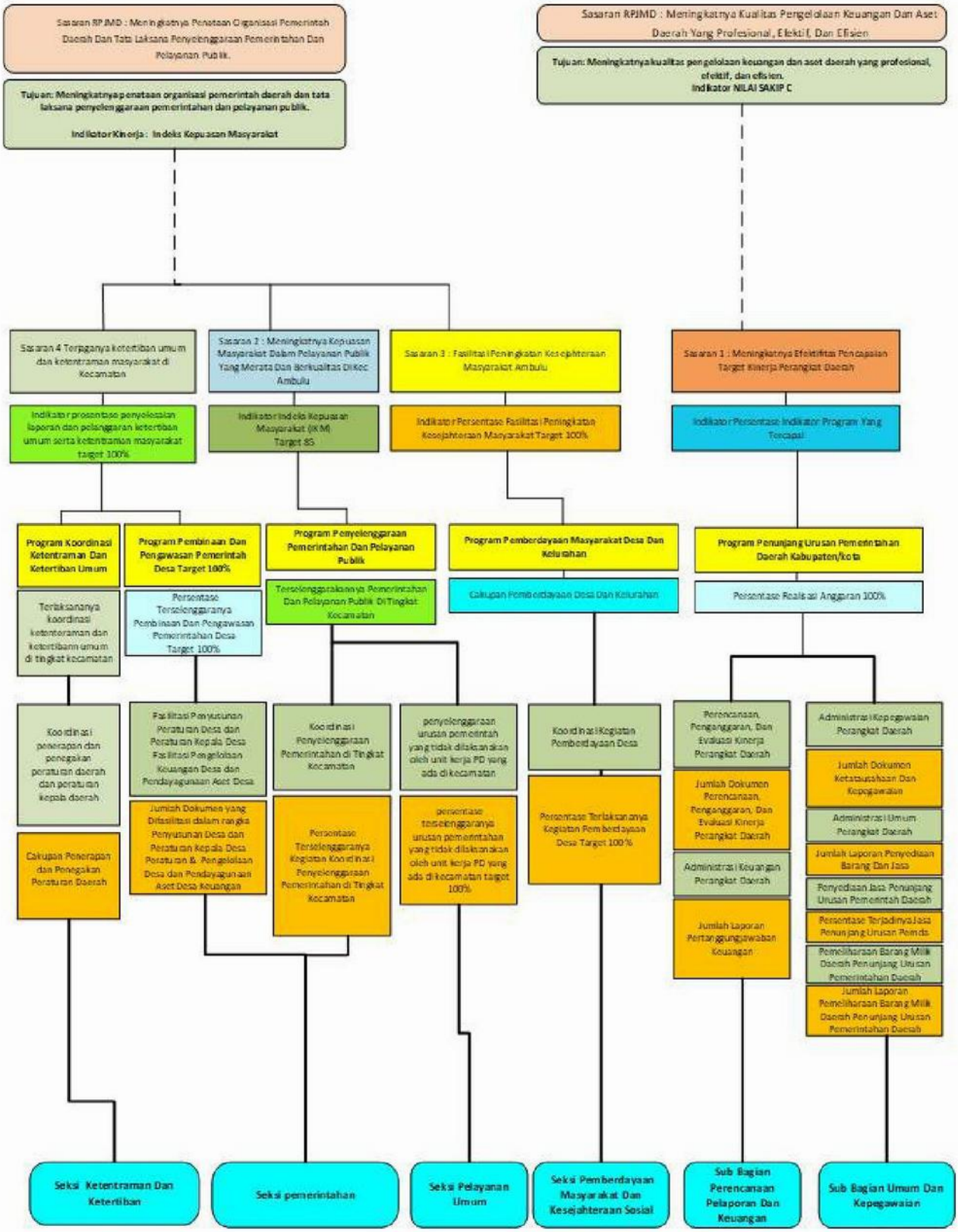

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kecamatan Ambulu Nomor : 065/033/35.09.11/2023 Tanggal 21 Nopember 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	dan Berkualitas di Kecamatan				
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi ———————————— x 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg diselesaikan. ———————————— x100% Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg masuk	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai. ——————————— x 100% Jumlah indikator program	Sekcam	LAKIP

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Ambulu Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Ambulu tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ambulu tahun 2021-2026

N0	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	100%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Ambulu didukung dengan anggaran :

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.595.215.039	P- APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	1.046.364.300	P- APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	143.585.800	P- APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	244.317.700	P- APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	3.442.600	P- APBD
	J u m l a h	Rp.	4.042.925.439	

Senilai Empat milyar empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Ambulu dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Ambulu menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➢ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➢ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➢ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➢ 60 - 70	Baik
5.	CC	➢ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➢ 30 - 50	Kurang
7.	D	➢ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
    a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress*** **positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN AMBULU

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Ambulu telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Ambulu tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) Tujuan, 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indicator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023

Tabel 3.1

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Indikator Program yang tercapai	80%	96,83%	114%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	83,57 %	83.57%
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	2 Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	100%	100%
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	100%	96%	96%

Sumber Data:

1. *Perjanjian Kinerja*
2. *Indek Kepuasan Masyarakat (E Sukma)*
3. *Laporan Realisasi APBD 2023*

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Kecamatan Ambulu rata rata mencapai 94,60 % dan masuk dalam kategori Memuaskan Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Ambulu telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Ambulu tahun 2021 - 2026. Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI	
			2021	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	-	80%	88%	98.83%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80%	85%	72%	83,57 %
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang	-	100 %	100%	100%	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI	
			2021	2022	2023	2022	2023
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	-	100 %	100%	94,33%	96%

Sumber Data:

1. *Perjanjian Kinerja*
2. *Indek Kepuasan Masyarakat (E Sukma)*
3. *Laporan Konsistensi SKPD kecamatan Ambulu Tahun 2022 (SIPPD)*
4. *Laporan Konsistensi SKPD kecamatan Ambulu Tahun 2023 (SIPPD)*

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2023 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat	Persentase Indikator Program yang tercapai	85%	96,83 %	114%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	83,57 %	83.57%
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	100%	96%	96%

Sumber Data:

1. *Perjanjian Kinerja*
2. *Indek Kepuasan Masyarakat (E Sukma)*
3. *Laporan Realisasi APBD 2022*
4. *Laporan Realisasi APBD 2023*

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja	Persentase Indikator Program yang tercapai	96,83%		
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,57 %		
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%		
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	96%		

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Capaian sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah 114% dengan Capaian Kinerja 96,83 % dari Target Jangka Menengah Pada Renstra tahun 2026 adalah 85 % sehingga dalam capaian kinerja tahun 2023 masuk kategori Memuaskan , dan terdapat peningkatan realisasi capaian kinerja dari 88 % Tahun 2022 dan pada tahun 2023 dengan realisasi 96,83 % .
- Sasaran Capaian sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan adalah 83,57 % dengan Capaian Kinerja 83,57 % dari Target Jangka Menengah Pada Renstra tahun 2026 adalah 100 % sehingga dalam capaian kinerja tahun 2023 masuk kategori Memuaskan, dan terdapat Peningkatan realisai dari 72 % Tahun 2022 dan pada tahun 2023 dengan realisasi 83,57 % .

- Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atas pelayanan publik di Kecamatan ambulu dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SUKMA-e. Pemanfaatan pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh umpan balik perbaikan atas pelayanan publik yang dilaksanakan.
- Pelayanan kecamatan ambulu sesuai tugas dan fungsinya antara lain pelayanan surat keterangan, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan fasilitasi pengelolaan dana desa, pemberian pelatihan, fasilitasi pendistribusian bantuan, pelayanan administrasi pertanahan, Pelayanan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, koordinasi dengan pemerintah desa;
- Sasaran Capaian sasaran Strategis Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan adalah 100 % dengan Capaian Kinerja 100 % dari Target Jangka Menengah Pada Renstra tahun 2026 adalah 100 % sehingga dalam capaian kinerja tahun 2023 masuk kategori Memuaskan , dan mampu mempertahankan capaian kinerja 100 % seperti tahun 2022;
- Sasaran Capaian sasaran Strategis Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan adalah 96 % dengan Capaian Kinerja

96 % dari Target Jangka Menengah Pada Renstra tahun 2026 adalah 100 % sehingga dalam capaian kinerja tahun 2023 masuk kategori Memuaskan , dan terdapat Peningkatan realisai dari 94,33 % Tahun 2022 dan pada tahun 2023 dengan realisasi 96 % .

Mengacu capaian Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 yang didasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Kecamatan Ambulu rata rata mencapai 94.60 % dan masuk dalam kategori memuaskan dan perlu ditingkatkan dengan membangun budaya kerja yang positif dan kolaboratif baik dilingkungan Organisasi maupun dalam pelayanan publik

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5

Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah								
Indikator Persentase Indikator Program yang tercapai	96,83		✓					
Rata rata capaian	96,83		✓					
Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan								
Indikator	83,57				✓			

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Indeks Kepuasan Masyarakat								
Rata rata capaian	83,57							
Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan								
Indikator Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100		✓					
Rata rata capaian	100		✓					
Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan								
Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	97		✓					

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Ambulu dalam kategori memuaskan

Sasaran Strategis 1 :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah 114% dengan Capaian Kinerja 96,83 % dari Target Jangka Menengah Pada Renstra tahun 2026 adalah 85 % sehingga dalam capaian kinerja tahun 2023 masuk kategori Memuaskan , dan terdapat peningkatan realisasi capaian kinerja dari 88 % Tahun 2022 dan pada tahun 2023 dengan realisasi 96,83 % ,

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yang menjadi permasalahan

1. terdapat kendala atau hambatan dalam implementasi program dan kegiatan akibat perubahan regulasi dan kebijakan.
2. adanya permasalahan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektoral.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rencana strategis ke depan, antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur.
2. Meningkatkan koordinasi antar Seksi terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Melakukan kajian kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.
4. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.
5. Melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian kinerja perangkat daerah dapat kembali meningkat dan bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sasaran Strategis 2 :

Capaian kinerja kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Kecamatan Ambulu pada tahun 2023 sebesar 83,57% merupakan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 72%. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ambulu mulai membuahkan hasil meskipun capaian ini masih berada di bawah target jangka menengah sebesar 100% pada tahun 2026.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target 100% tersebut adalah:

- Kualitas pelayanan publik wilayah di Kecamatan Ambulu belum Optimal diantaranya yaitu petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dan kemampuan petugas dalam pelayanan;

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik dalam hal tidak memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai, seperti sinyal akses internet lemah dan perangkat Komputer yang kurang memenuhi standar
- Kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan capaian target ini, beberapa rencana strategi yang dapat dilakukan adalah:

- Melakukan standarisasi Operasi prosedur dan persyaratan pelayanan publik di Kecamatan Ambulu.
- Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik terutama di Kantor Kecamatan Ambulu yang masih belum memadai dengan menambah jaringan internet dan kuota internet khusus untuk pelayanan dan meng upgrade semua perangkat komputer
- Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi SDM penyelenggara layanan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- Memperluas layanan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
- Melakukan survei kepuasan masyarakat (E Sukma) secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan memperbaiki kualitas pelayanan.

Dengan upaya-upaya tersebut, target 100% kepuasan masyarakat Kecamatan Ambulu pada tahun 2026 diharapkan dapat tercapai.

Sasaran Strategis 3 :

Capaian sasaran Strategis Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan adalah 100 % dengan Capaian Kinerja 100 % dari Target Jangka Menengah Pada Renstra tahun 2026 adalah 100 % sehingga dalam capaian kinerja tahun 2023 masuk kategori Memuaskan. Dalam Capaian Sasaran Strategis tersebut pada tahun 2023 Kecamatan diantaranya :

1. Target Kinerja peningkatan status 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Ambulu dari Status Desa Maju menjadi Desa Mandiri dari 90 % menjadi 100 % pada Triwulan II ;

2. Peningkatan Status Akreditasi tiga Puskesmas Sabrang dan Andongsari dari Dasar menjadi Status akreditasi Paripurna , status Akreditasi Puskesmas Ambulu dari Madya menjadi Status Akreditasi Paripurna;
3. 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Ambulu menjadi Desa ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) pada tahun 2023
4. Perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2023 mencapai PBB 70,71 % peringkat ke-4 di Kabupaten mengalami kenaikan yang sebelumnya pada tahun 2022 perolehan Pajak PBB mencapai 65,87 % ;

   Dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut tidak lepas adanya sinergi antar stakeholder di Kecamatan Ambulu, seperti Koramil dan Babinsa, kader posyandu dan tokoh masyarakat. Sinergi antar stakeholder tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi dan koordinasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, pemanfaatan sumber daya, dan pembentukan jaringan kerja. Sedangkan perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2023 mencapai PBB 70,71 % dapat tercapai dengan menyelenggarakan program-program edukasi untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pajak bagi pembangunan desa. Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses penerimaan pajak dan meningkatkan system pengawasan penerimaan pajak (dengan melakukan Monev setiap triwulan di desa – desa). Dengan adanya sinergi antar stakeholder, diharapkan dapat tercipta program-program pemberdayaan masyarakat desa yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun yang akan datang

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan, Kecamatan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

- Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
- Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.

- Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.

Sasaran Strategis 4 :

Capaian kinerja Kecamatan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di tahun 2023 telah mencapai 96%, yang merupakan hasil yang memuaskan. Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategisnya, seperti pelaksanaan patroli rutin, penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak, peningkatan partisipasi pemuda, pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

- Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.

- Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan program dan kegiatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Dengan melakukan hal-hal di atas, diharapkan Kecamatan dapat meningkatkan capaian kinerja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Ambulu pada tahun 2023 didukung 4 (empat) Program 10 (Ssepuluh) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6

Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur

Kecamatan Ambulu

tahun 2023

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Input : Dana yang dibutuhkan	2.089.889.761	1.735.502.224	83%
	Output : Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan	18 orang	17 orang	94%
	Outcome : Terwujudnya kesejahteraan ASN			
	sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Input : Laporan keuangan SKPD	96.414.500	88.060.000	91%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Output : Laporan keuangan SKPD yang telah ditelaah dan diverifikasi	100 dokumen	100 dokumen	100 %
	Outcome : Laporan keuangan SKPD yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan			
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
	Input : Dana yang dibutuhkan	14.000.000	8.400.000	60%
	Output : Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	28 stel	28 stel	100%
	Outcome : Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel			
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Input : Dana yang dibutuhkan	226.198.300	190.017.750	84%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Output : Jasa pelayanan umum kantor yang sesuai dengan kebutuhan	12 paket	12 paket	100%
	Outcome : Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Input : Dana yang dibutuhkan	44.641.700	36.507.510	82%
	Output : Laporan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas	1 unit	1 unit	100%
	Outcome : Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Input : Anggaran belanja untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	24.674.000	21.963.500	89%
	Output : Laporan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 unit	2 unit	100%
	Outcome : Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Input : Anggaran belanja untuk pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	9.520.878	9.434.700	99%
	Output : Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terawat atau telah direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%
	Outcome : Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Input :-Dana yang dibutuhkan	2.036.000	1.250.000	61%
	Output : Dokumen perencanaan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Outcome : Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah			
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Input : Dana yang dibutuhkan dan Data kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	87.839.900	74.600.000	85%
	Output : Peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai dengan kebutuhan	8 unit	8 unit	100%
	Outcome : Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel			

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
a	sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Input : Rencana Strategis (Renstra) SKPD	1.031.672.500	1.020.900.000	99%
	Output : Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12	12	100%
	Outcome : Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
a	sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Input :	14.691.800	8.982.500	61%
	Output : Terlaksananya peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	10.000	10.393	100%
	Outcome : Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat			

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Ambulu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih

Rapat Koordinasi

1. Dilaksanakan 15 kali dalam satu Anggaran
2. Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi
3. Peserta Kegiatan, Muspika, Kepala Desa,Perangkat Desa, Kepala Instasi Lintas Sektoral, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama.

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kantor Kecamatan Ambulu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, sehingga dapat mencapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih

(pelum)

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
a	sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Input :	6.718.800	5.758.800	86%
	Output : Tersusunnya rencana peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	16	16	100%
	Outcome : Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan desa			
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
b	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Input :	136.867.000	121.425.500	89%
	Output : Terlaksananya peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	20	20	100%
	Outcome : Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera			

Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa bertujuan untuk mengintegrasikan secara langsung keinginan dan kebutuhan masyarakat desa ke dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang selaras dengan potensi sumber daya lokal. Sub kegiatan ini melibatkan pemerintah desa, dewan penasihat desa, dan warga setempat sebagai peserta Musrenbangdes. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat desa dalam pembangunan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan Desa.

Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa meliputi beberapa tahapan : Persiapan musrenbangdes, penyiapan dokumen, serta penentuan waktu dan tempat musrenbangdes, Evaluasi dan laporan Murenbangdes (Meliputi evaluasi proses dan hasil musrenbangdes, penyusunan laporan musrenbangdes, dan penyampaian laporan musrenbangdes).

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dan desa di wilayah kecamatan Ambulu. Sub kegiatan ini melibatkan camat sebagai koordinator yang melakukan sinkronisasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan desa diantaranya dengan melaksankan Pembinaan Pengurus Karang Taruna,Pembinaan Puskesos,Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Bagi Pik-R /Fad, Sosialisasi Pencegahan Pms/Ims Dalam Rangka Penurunan AKI/AKB

Sasaran Strategis 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	Input :	244.317.700	237.930.00	97%
	Output : Laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi koordinasi	24	22	92%
	Outcome : Terciptanya kondisi ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat			
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
	Input :	3.988.800	3.487.500	87%
	Output : Laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	3	3	100%
	Outcome : Terpeliharanya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa			
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
	Input : Anggaran	9.453.800	8.050.000	85%
	Output : Laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	3	3	100%
	Outcome : Terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik, tertib, transparan dan akuntabel			

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia Pembinaan Linmas Se-wilayah Kecamatan Ambulu Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Kecamatan Ambulu menyelenggarakan kegiatan Pembinaan untuk anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ada di wilayah Kecamatan Ambulu, bertempat di Aula Wisnu Graha Kantor Kecamatan Ambulu. Kegiatan Pembinaan Linmas ini diikuti oleh perwakilan Linmas dari desa-desa se-Kecamatan Ambulu DAN Sub kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Patroli ke Wilayah Kecamatan Ambulu dan Pemantauan NATARU Bersama 3 Pilar

Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam membuat peraturan desa (Perdes) dan peraturan kepala desa (Perkades) yang sesuai dengan kaidah hukum dan teknik penyusunan. Sub kegiatan ini melibatkan camat sebagai fasilitator yang melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap proses penyusunan Perdes dan Perkades. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Perdes dan Perkades yang menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa

Jenis Kegiatan : Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES).

1. Dilaksanakan 1 kali dalam satu Anggaran
2. Bentuk kegiatan :
    1. Pelatihan/Bimbingan Teknis penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES).
    2. Peserta Kegiatan, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan, Operator Desa dan Kasi Kesra sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) dari Desa-desa se Kecamatan Ambulu
    3. Materi pelatihan,
        - Tata cara pelaksanaan, penyusunan dan pelaporan RKP Desa
        - Tata cara pelaksanaan, mekanisme, penyusunan dan penetapan APB Desa
        - Teknis Pembuatan RAB

Out Put kegiatan :

a. peserta mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tahapan penyusunan RKP Desa
b. peserta mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tahapan penyusunan dan penetapan APB Desa Tepat waktu

Peserta khususnya PK dapat membuat RAB kegiatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan aset desa sesuai dengan kaidah hukum dan teknik pengelolaan. Sub kegiatan ini melibatkan camat sebagai fasilitator yang melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Sub kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan desa yang baik, tertib, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang profesional, responsif, dan akuntabel di tingkat desa.

Sub kegiatan ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

Jenis Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi penggunaan DD, ADD BGH.

1. Dilaksanakan di tujuh Desa yang ada di Kecamatan Ambulu yakni Desa Pontang, Andongsari, Sabrang, Sumberejo, Tegalsari, Ambulu dan Karanganyar
2. Bentuk kegiatan :
   a. Pembinaan Administrasi keuangan desa, monitoring penyusunan Surat pertanggungjawaban (SPJ) setiap tahapan pencairan DD, ADD dan BGH P/R.

b. Pengecekan lokasi pelaksanaan pembangunan fisik

3. Dilaksanakan 3 kali dalam setahun
4. Out Put kegiatan : dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Ambulu adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	99,33	83,78	Efisien
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	100	80	Efisien
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	100	87,5	Efisien

NO	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	97,33	89,67	Efisien

Sumberdaya Manusia Kecamatan Ambulu berjumlah 14 orang dengan rincian 5 pejabat struktural dan 9 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalan rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi terbagi menjadi 4 sasaran yaitu

Sasaran 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 2.595.215.039 ,- dan terserap sebesar Rp. 2.165.735.684,00 ,-;

Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan dalam Program urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 1.046.364.300,- dan terserap sebesar Rp. 1.029.882.500,-;

Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 143.585.800,- dan terserap sebesar Rp. 127.184.300,-;

Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan dalam Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 244.317.700,- dan terserap sebesar Rp. 237.930.000,-, dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Daerah

didukung anggaran sebesar Rp. 13.442.600,- dan terserap sebesar Rp. 11.537.500,-,

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Ambulu dengan rata- rata capaian Kinerja 84 **%**

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ambulu , pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 4.042.925.439 ,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 3.955.085.539 ,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 87.839.900 ,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan Kecamatan Ambulu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.595.215.039	2.165.735.684	83%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.186.304.261	1.823.562.224	83%
	sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.089.889.761	1.735.502.224	83%
	sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.414.500	88.060.000	91%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000	8.400.000	60%
	sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.000.000	8.400.000	60%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.198.300	190.017.750	84%
	sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.198.300	190.017.750	84%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.641.700	36.507.510	82%
	sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.641.700	36.507.510	82%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.674.000	21.963.500	89%
	sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.674.000	21.963.500	89%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.520.878	9.434.700	99%
	sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.520.878	9.434.700	99%
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.036.000	1.250.000	61%
	sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.036.000	1.250.000	61%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.839.900	74.600.000	85%
	sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.839.900	74.600.000	85%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.046.364.300	1.029.882.500	98%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.031.672.500	1.020.900.000	99%
	sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.031.672.500	1.020.900.000	99%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	14.691.800	8.982.500	61%
	sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.691.800	8.982.500	61%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	143.585.800	127.184.300	89%
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.718.800	5.758.800	86%
	sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	6.718.800	5.758.800	86%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	136.867.000	121.425.500	89%
	sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	136.867.000	121.425.500	89%
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	244.317.700	237.930.000	97%
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	244.317.700	237.930.000	97%
	sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	244.317.700	237.930.000	97%
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.442.600	11.537.500	86%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.988.800	3.487.500	87%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.988.800	3.487.500	87%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.453.800	8.050.000	85%
	sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.453.800	8.050.000	85%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Ambulu pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.572.269.984,- dari total sebesar Rp. 4.042.925.439 ,- atau 88,4 %. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami penurunan sebesar 6,9 % yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesarRp. 3.808.233.369,- terealisasi sebesar Rp 3.596.844.312,- atau 94,45 %. penurunan ini disebabkan karena meningkatkan belanja Gaji Pagunya besar dan efisensi Anggaran.

Pada tahun 2023, karena kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten, terdapat pengurangan anggaran pada P-APBD 2023 di Kecamatan Ambulu sebesar Rp 517.708.289, antara lain pengurangan pada :

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD	P-APBD	PENGURANGAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**2.637.181.228**	**2.595.215.039**	**41.966.189**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.136.000	2.036.000	3.100.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.136.000	2.036.000	3.100.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.197.468.450	2.186.304.261	11.164.189
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.098.833.950	2.089.889.761	8.944.189
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	98.634.500	96.414.500	2.220.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.200.000	14.000.000	10.200.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	24.200.000	14.000.000	10.200.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.594.200	87.839.900	2.754.300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.594.200	87.839.900	2.754.300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.946.000	226.198.300	20.747.700
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.946.000	226.198.300	20.747.700
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.836.578	78.836.578	- 6.000.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD	P-APBD	PENGURANGAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.141.700	44.641.700	- 4.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.174.000	24.674.000	- 1.500.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.520.878	9.520.878	-
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1.046.364.300**	**1.046.364.300**	**-**
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.031.672.500	1.031.672.500	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.031.672.500	1.031.672.500	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14.691.800	14.691.800	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	14.691.800	14.691.800	-
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**610.709.900**	**143.585.800**	**467.124.100**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	610.709.900	143.585.800	467.124.100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.718.800	6.718.800	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	603.991.100	136.867.000	467.124.100

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD	P-APBD	PENGURANGAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**252.935.700**	**244.317.700**	**8.618.000**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	252.935.700	244.317.700	8.618.000
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	252.935.700	244.317.700	8.618.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**13.442.600**	**13.442.600**	**-**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.988.800	3.988.800	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.453.800	9.453.800	-
	Total Anggaran	**4.560.633.728**	**4.042.925.439**	**517.708.289**

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ambulu merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Ambulu Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan olehKecamatan Ambulu pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Ambulu 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Ambulu pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Ambulu dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan memuaskan karena dari 4 (empat) indikator sasaran sebanyak 4 (empat) indikator pencapaiannya dalam kategori sangat baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 3.572.269.984,-,- (88.36%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ambulu masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pemerintahan Kecamatan Ambulu
2. Kurangnya pemahaman mengenai proses-proses pemerintahan, pelayanan publik, dan tata kelola yang baik.
3. Keterbatasan sumber daya manusia yang handal, terampil dan memiliki kompetensi yang tinggi

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Mencukupi ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pemerintahan Kecamatan Ambulu;
2. Menyediakan dukungan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan lokal dengan memfasilitasi proses pemerintahan dan pelayanan publik
3. Menambah dan meningkatan sumber daya manusia yang handal, terampil dan memiliki kompetensi yang tinggi

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Ambulu yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

Lampiran 1

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN AMBULU TAHUN 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)	95	95	96	97	98	99
			Persentase Peningkatan PBB, PajaK Lainnya dan Retribusi	100	100	100	100	100	100
			Persentase Desa Mandiri	100	100	100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			pada Kec Ambulu						
Sesudah Perubahan Renstra									
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP Ambulu			80	82	85	85
		Meningkatnya Efektifitas Penca paian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai			80	80	80	100
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerin tahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah			4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			80	82	82	85
		Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%
1		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentara			100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			man Masyarakat						

CAMAT AMBULU

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN AMBULU

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 198602 1 004

Lampiran 2 a

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN AMBULU

JL. RAYA SUYITMAN ☎ (0336) 883300 AMBULU 68172

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, maasyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	96	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip OPD	96				
					Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 5.136.000
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan	18 Orang/Bulan	Rp 2.197.468.450

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Sub Kegiatan Pelaksanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (SPM)	100 Dokumen	Rp 98.634.500
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Pegawai Yang difasiliasi sesuai rencana	100%	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta atributnya	Jumlah Paket Pengadaan pakaian Dinas	1 Paket	Rp 24.200.000
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 90.594.200
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan jasa Operasional Kantor yang difasilitasi sesuai rencana	100%	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	Rp 246.946.000
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yg dilaksanakan pemeliharaan sesuai rencana	100%	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Rp 40.141.700

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								atau kend. Dinas Jabatan			
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	Rp 23.174.000
								Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Rp 9.520.878
		Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	85%	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKM terhadap layanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	B Nilai				
					Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaran pemerintahan yg ditindak lanjuti	100%	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Rp 1.031.672.500
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Persentase dokumen adminduk dan surat surat	100%	Sub Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan efektifitas kepada masyarakat di	Jumlah warga masyarakat yang bisa terfasilitasi dalam pengurusan surat surat	10000 Surat	Rp 14.691.800

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	yang diterbitkan		wilayah kjecamatan			
		Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Ambulu	90%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditindaklanjuti	100%				
					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditindaklanjuti	100%	Sub Kegiatan Penigkatan Partisipasi Masyarakat dlam forum Musawarah Perencanan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musawarah perencanan pembangunan di Desa	16 lembaga	Rp 6.718.800
								Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyara- kat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penigkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyara kat di Wilayah Kecamatan	20 laporan	Rp 603.991.100
					Program Koordinasi	Persentase koordinasi	100%				

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Ketentraman Dan Ketertiban Umum	ketenraman dan ketertiban yang dapat terfasiitasi kecamatan					
					Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	24 laporan	Rp 252.935.700
					Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Pemerintah Desa yang dapat terfasilitasi oleh Kecamatan	100%				
					Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Rekomendasi kepada Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	100%	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 dokumen	Rp 3.988.800

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Pemerintahan Desa						
								Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 dokumen	Rp 9.453.800

Jember, 01 Pebruari 2023

CAMAT AMBULU,

PEMERINTA KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 198602 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN AMBULU

JL. RAYA SUYITMAN ☎ (0336) 883300 AMBULU 68172

Lampiran 2 b

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
(PERUBAHAN RENSTRA SESUAI TC 25)
TAHUN 2023

Sesudah Perubahan (sesuai TC 25)

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP Ambulu	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase realisasi anggaran	100%				
					Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 2.036.000,00
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	4 Lap	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan	18 Orang/Bulan	Rp 2.089.889.761,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	3 Dokumen	Rp 96.414.500,00
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Pegawai Yang difasiliasi sesuai rencana	1 Dokumen	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta atributnya	Jumlah Paket Pengadaan pakaian Dinas	1 Paket	Rp 14.000.000,00
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 87.839.900,00
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan jasa Operasional Kantor yang difasilitasi sesuai rencana	100%	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dibayarkan Pajaknya	12 bulan	Rp 226.198.300,00
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yg dilaksanakan pemeliharaan sesuai rencana	100%	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kend. Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 unit	Rp 44.641.700,00
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1 unit	Rp 24.674.000,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
								Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	Rp 9.520.878,00
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%				
					Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaran pemerintah an yg ditindak lanjuti	100%	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Rp 1.031.672.500,00
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase dokumen adminduk dan	100%	Sub Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan efektifitas	Jumlah warga masyarakat yang bisa terfasilitasi	10000 Surat	Rp 14.691.800,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	surat surat yang diterbitkan		kepada masyarakat di wilayah kecamatan	dalam pengurusan surat surat		
		Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditindaklanjuti	100%				
					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditindaklanjuti	100%	Sub Kegiatan Penigkatan Partisipasi Masyarakat dlam forum Musawarah Perencanan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musawarah perencanan pembangunan di Desa	16 lembaga	Rp 6.718.800,00
								Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyara- kat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penigkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyara kat di Wilayah Kecamatan	20 laporan	Rp 136.867.000,00
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan	100%	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenraman dan ketertiban yang	100%				

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
		di Kecamatan	Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman an Masyarakat			dapat terfasiitasi kecamatan					
					Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	24 laporan	Rp 244.317.700,00
					Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Pemerintah Desa yang dapat terfasilitasi oleh Kecamatan	100%				
					Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Rekomendasi kepada Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	100%	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 dokumen	Rp 3.988.800,00

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Pemerintahan Desa						
								Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 dokumen	Rp 9.453.800,00

Jember, 21 Nopember 2023

CAMAT AMBULU,

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN AMBULU

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 198602 1 004

Lampiran 3 a

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU
JL. RAYA SUYITMAN NO. 120 TELP. 0336 – 883300
AMBULU 68172

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
Jabatan : Camat Ambulu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 01 Februari 2023

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Pihak Pertama
CAMAT AMBULU,

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
NIP. 19660706 198602 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KECAMATAN AMBULU

N0	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	96
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	85%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Ambulu	90%

	Program	Anggaran		Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.637.181.228	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	1.046.364.300	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	610.709.900	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	252.935.700	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	13.442.600	APBD
	J u m l a h	Rp.	4.560.633.728	

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 01 Februari 2023

CAMAT AMBULU

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si

NIP. 19660706 198602 1 004

Lampiran 3 b

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU
JL. RAYA SUYITMAN NO. 120 TELP. 0336 – 883300
AMBULU 68172

PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si

Jabatan : Camat Ambulu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 Nopember 2023

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Pihak Pertama
CAMAT AMBULU,

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
NIP. 19660706 198602 1 004

PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2023
KANTOR KECAMATAN AMBULU

N0	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	100%

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.595.215.039	P – APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	1.046.364.300	P – APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	143.585.800	P – APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	244.317.700	P – APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	3.442.600	P – APBD
	J u m l a h	Rp.	4.042.925.439	

Jember, 21 Nopember 2023

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

CAMAT AMBULU

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
NIP. 19660706 198602 1 004

Lampiran 4 a

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU
Jl. Raya Suyitman No. 120 ☎ (0336) 883300 Ambulu 68172

KEPUTUSAN CAMAT AMBULU
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 065/ 01 /35.09.12/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Ambulu ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomr 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Ambulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 03 Januari 2023

CAMAT AMBULU
KABUPATEN JEMBER

PEMERINTA KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 198602 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Instansi : Kecamatan Ambulu

Tugas :
a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum ;
b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati ;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum ;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan ;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan ;
h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan ;
i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ; dan
j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Fungsi :
a. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi ;
b. Penanganan Konflik Sosial;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintah baik wilayah antar Provinsi dan Daerah;
d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan;
e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan ;
f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;

j. Pemberian fasilitasi pemilihan Kepala Desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga ;

m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/ kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah Kecamatan;

o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;

p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas ;

q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai ; dan

r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Nilai Survey Kepuasan (SKM) Aparatur	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan	Hasil perhitungan Survey Kepuasan (SKM) Aparatur	Sekretariat dan seksi Pemeritahan	Dokumen Survey
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kasi Pelayanan Umum	Dokumen Survey
3	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. % hasil koordinasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti x 100% jumlah Koordinasi	Kasi PMKS	Hasil Koordinasi
4		2 % hasil koordinasi, ketentraraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti x 100% jumlah Koordinasi	Seksi Trantib	Hasil Koordinasi

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU

CAMAT AMBULU

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 198602 1 004

Lampiran 4 b

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU
JL. PAHLAWAN NO. 25 AMBULU 68162

KEPUTUSAN CAMAT AMBULU
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 033 /35.09.11/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Camat ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Ambulu dalam :

a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Ambulu Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Camat Ambulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 21 November 2023

CAMAT AMBULU
KABUPATEN JEMBER

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 198602 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Instansi : Kecamatan Ambulu

Tugas : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Fungsi : 1. Pelaksana teknis kewilayahan

2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien.

2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi / Jumlah kegiatan pemberdayaan x 100%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
					pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg diselesaikan. ——————————— x100% Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg masuk	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai. ——————————— x 100% Jumlah indikator program	Sekcam	LAKIP

CAMAT AMBULU

KECAMATAN AMBULU

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 198602 1 004